BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Pemerintahan di Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 masehi dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun, beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribu Kota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke -6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki Dalem Kaum I, kekuasaan di Nusantara beralih ke Pemerintahan Hindia Belanda yang dipegang Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat hingga ke Panarukan di Jawa timur, dengan jarak mencapai kurang lebih 1000 kilometer.

Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan Bupati Daerah masing-masing. di daerah Bandung khususnya dan di daerah Priangan pada umumnya, jalan raya pos mulai dibangun pertengahan

tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada, di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, Jalan Achmad Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar Pejabat Pemerintah Kolonial mudah mendatangi Kantor Bupati, Daendels memerintahkan melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan Ibukota Kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat Pemerintahan, tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun, Alasan pemindahan Ibukota itu antara lain dikarenakan Krapyak tidak strategis sebagai Ibukota Pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal Ibukota baru, mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu, kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor, akan tetapi tidak diketahui secara pasti berapa lama Kota

Bandung dibangun dan Kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan Kota itu langsung dipimpin oleh Bupati.

Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (*the founding father*) Kota Bandung, Kota Bandung diresmikan sebagai Ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810, tahun 1906 Kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi *Gemeente* (Kotapraja) yang berpemerintahan Otonom, Maka sejak itu pemerintahan Kabupaten Bandung terpisah dengan pemerintahan *Gemeente Van Bandoeng* (Kotapraja Bandung), ketetapan itu semakin memperkuat fungsi Kota Bandung sebagai pusat Pemerintahan, terutama Pemerintahan Kolonial Belanda di Kota Bandung, semula *Gemeente* Bandung dipimpin oleh Asisten Residen Priangan selaku Ketua Dewan Kota, tetapi sejak tahun 1933 *Gemeente* dipimpin oleh *Burgemeester* atau Walikota (Sumber: http://www.bandung.go.id/?fa=sekilas.detail&id=10 , diakses pada tanggal 27 februari 2013 pukul 20.00 WIB).

Pemerintahan di Kota Bandung sangat memegang peranan penting dalam perkembangan Kota Bandung sendiri untuk menuju tercapainya apa yang menjadi tujuan pembangunan masyarakat di Kota Bandung, karena kota ini merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, yang secara tidak langsung merepresentasikan masyarakat lainnya di luar Kota Bandung itu sendiri,

berikut merupakan nama-nama Walikota Bandung dari awal hingga periode tahun 2012;

Tabel 3.1

WALIKOTA BANDUNG Tahun 1906-Sekarang

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	E.A. Maurenbrecher (exofficio)	1906-1907
2.	R.E. Krijboom (exofficio)	1907-1908
3.	J.A. van Der Ent (exofficio)	1909-1910
4.	C.C.B. van Vlenier (exofficio)	1912-1913
5.	C.C.B. van Vlenier (exofficio)	1912-1913
6.	B. van Bijveld (exofficio)	1913-1920
7.	B. Coops	1920-1921
8.	S.A. Reitsma	1921-1928
9.	B. Coops	1928-1934
10.	Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr	1934-1936
11.	Mr. J.M. Wesselink	1936-1941
12.	R.A. Atmadinata	1941-1945
13.	R. Syamsoerizal	1945-1947
14.	Ir. Oekar Bratakoesoemah	1947 – 1949
15.	R. Enoch	1949-1957
16.	R. Priatna Kusumah	1957 – 1966
17.	R. Didi Djukardi	1966 – 1968
18.	R. Hidayat Sukarmadidjaja	1968 – 1970
19.	R. Otje Djoendjoenan Setiakusumah	1971 – 1976
20.	. H.Utju Djoenaedi	1976 – 1978
21.	. R. Husen Wangsaatmadja	1978 – 1983
22.	. H. Ateng Wahyudi	1983-1988–1993
23.	H. Wahyu Hamidjaja	1993 – 1998
24	H. AA Tarmana	1998 – 2003
25	H. Dada Rosada .SH. Msi	2003 – Sekarang

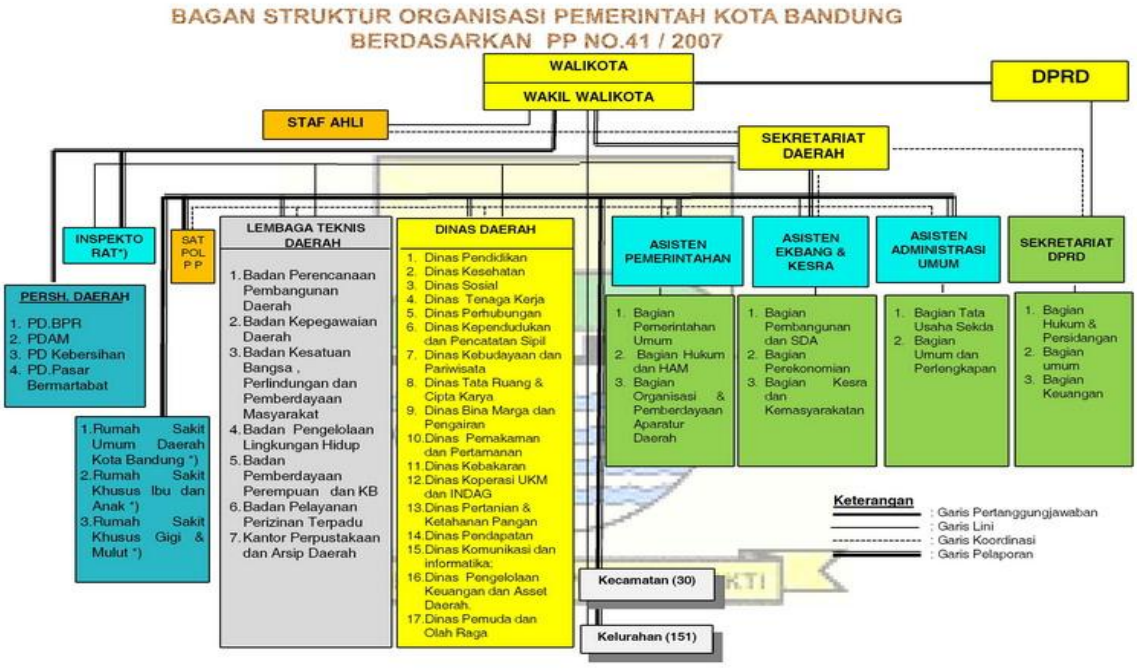
(Sumber: http://www.bandung.go.id/?fa=sekilas.detail&id=10 , diakses pada tanggal 27 februari 2013 pukul 20.00 WIB.)

3.1.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam menggambarkan mengenai sinergitas, hubungan, tugas, wewenang, serta fungsi masing-masing bagian, dimana dalam penelitan ini akan lebih difokuskan pada Bagian Pemerintahan Umum, hal ini dikarenakan karena bagian inilah yang menangani hubungan kerjasama luar negeri khususnya kerjasama *Sister City* dengan Kota Braunschweig

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung Per 25 Februari 2013



(Sumber: http://www.bandung.go.id/?fa=pemerintah.detail&id=31 diunduh pada 25 februari 2013 pukul 13.22 WIB).

3.1.1.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Bandung.

Kota Bandung memiliki visi terwujudnya kota Bandung sebagai Kota jasa yang "Bermartabat" yang memiliki arti bersih, makmur, taat, dan bersahabat, untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa.
2. Kota Bandung sebagai Kota jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.
3. Kota Bandung sebagai Kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban Kota.
4. Kota Bandung sebagai Kota jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan Kota yang bersahabat dalam pemahaman Kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, dan kedisiplinannya, berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (*revitalisasi*, *reaktualisasi*, *reorientasi* dan *refungsionalisasi*) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan misi yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian Kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian Kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

3. Mengembangkan budaya sosial yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana Kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan Kota dengan tetap memperhatikan tata ruang Kota dan daya dukung lingkungan Kota.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah Kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan Kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

   (http://www.bandung.go.id/?fa=pemerintah.detail&id=1

   diakses pada 25 februari 2013 pukul 16.00 WIB)

3.1.1.3 Program Strategi Pemerintah Kota Bandung

Dalam rangka mengembangkan Kota Bandung dan menjalankan Pemerintahan di Kota Bandung, Pemerintah berupaya

merealisasikannya dengan mengaplikasikannya ke dalam Program Strategi Kota Bandung yang terbagi ke dalam:

1. Strategi Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius dengan kebijakan mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan serta pelayanan keagamaan baik seluruh masyarakat dengan program pendidikan dasar, pra sekolah, program pendidikan menengah, program pembinaan pendidikan luar sekolah, program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat. program peningkatan pelayanan kesehatan, progarm pengawasan obat, makanan, bahan berbahaya serta program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
2. Strategi dalam rangka mengembangkan perekonomian kota yang adil dengan kebijakan mendorong peningkatan integrasi dan kepedulian sosial masyarakat dengan program pemahaman,dan kerukunan hidup umat beragama, program pengembangan dan perlindungan tenaga kerja, program pelayanan, rehabilitasi dan partisipasi sosial, program pemberdayaan perempuan, program pelayanan kependudukan,

program pembinaan pemuda dan olah raga, serta program pengembangan seni budaya daerah.

3. Strategi dalam rangka mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran serta berhati nurani dengan kebijakan mendorong peningkatan integrasi, ketahanan dan kepedulian sosial masyarakat, dalam program peningkatan pemahaman,dan kerukunan hidup umat beragama, program pembinaan, pengembangan produktifitas dan perlindungan tenaga kerja, program pelayanan, rehabilitasi dan partisipasi sosial, program pemberdayaan perempuan, program pelayanan kependudukan, program pembinaan pemuda dan olah raga, serta program pengembangan seni budaya daerah
4. Strategi dalam rangka meningkatkan penataan kota dengan kebijakan mengungkapkan peruasan dan penetapan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam program pengembangan kawasan kota, program penataan prasarana dan sarana, program penataan transportasi kota, program pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup, program penataan lingkungan permukiman, program tata ruang dan penatagunaan tanah, serta program pengamanan dan pendayagunaan aset pemerintah kota

5. Strategi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah Kota secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel dalam kebijakan mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pengawasan pembangunan kota. dalam program peningkatan perencanaan kota, program peningkatan hukum, program peningkatan prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota, program pengembangan aparatur pemerintah kota, program pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program peningkatan kualitas pengawasan, program pelayanan prima, program peningkatan partisipasi politik, program pengembangan kerjasama antar daerah dan kota, serta program peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan
6. Strategi dalam rangka mengembangkan sistem keuangan kota dengan kebijakan mendorong sistem keuangan kota yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam program peningkatan sistem pembiayaan pembangunan, program peningkatan kinerja badan usaha milik daerah, serta program pengembangan kemitraan.

   (http://www.bandung.go.id/?fa=pemerintah.detail&id=2

   diakses pada 25 februari pukul 12.22 WIB).

3.1.1.4 Mekanisme Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Hubungan Luar Negeri

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki, pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*, dalam menjalankan kewenangannya pemerintah daerah mengacu pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia yakni:

1. UU NO. 37/1999 pasal 1 ayat 1 tentang hubungan luar negeri yang menyebutkan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga Negara
2. UU No. 32/2004 pasal 42 tentang pemerintahan daerah dimana DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap perjanjian internasional di daerah serta mempunyai persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Negara, sehingga harus tunduk pada undang-undang tentang hubungan luar negeri, sebagai konsekuensi dari politik luar negeri, sedangkan hukum internasional hanya mengenal perjanjian antar Negara tanpa melihat bagaimana sistem internal Negara meningkatkan diri pada suatu perjanjian internasional, oleh karena itu dalam Panduan Umum tata cara hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah dalam BAB III, point 20 disebutkan syarat kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI.
2. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Mendapat persetujuan DPRD.
4. Tidak mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri
5. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masi ng-masing negara.
6. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.

7. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat dan saling menguntungkan bagiPemerintah Daerah dan masyarakat.
8. Mendukung Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

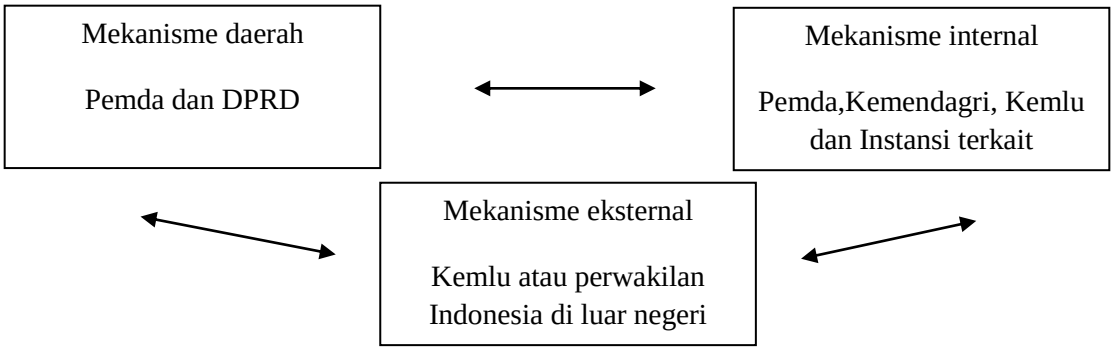
Sehingga pemerintah daerah bertindak membawa nama Negara bukan atas nama Pemerintah Daerah, dalam mengaplikasikan kewenanangannya, prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui 3 bagian yakni:

1. Mekanisme daerah yakni Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pihak pertama yang mengajukan rancangan kerjasama serta mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
2. Mekanisme internal yang di dalamnya terdapat Pemerintah Daerah, Kementrian Luar Negeri serta Instansi terkait sebagai sarana konsultasi dan koordinasi untuk mennjembatani kesepakatan yang diusulkan yang nantinya akan kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian internasional
3. Mekanisme Eksternal yang di dalamnya terdapat Kementrian Luar Negeri sebagai sarana untuk penerapan Undang-Undang hubungan luar negeri, penerapan Undang-Undang tentang

perjanjian internasional, Kementrian Luar Negeri/perwakilan terkait di luar negeri dapat mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan perwakilan asing terkait , dalam rangka memberikan pertimbangan politis/yuridis hubungan luar negeri, memantau serta melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama, dan sebagai lembaga pemberi surat kuasa/*full powers*.

Gambar 3.1

Tata cara umum kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah



(Sumber: Nurbintoro, 2011:5).

Dalam menjalankan kewenangannya pemerintah daerah bersama instansi terkait lainnya sebagai sarana konsultasi dan koordinasi, dalam mekanisme eksternal dimaksudkan untuk tidak bertentangan dengan politik luar negeri serta kebijakan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya, kemudian dalam konteks keamanan kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai

akses bagi kegiatan-kegiatan pihak asing yang dapat bertentangan dalam hal yang dapat menggangu dan mengancam stabilitas keamanan Negara, serta dalam konteks yuridis terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah yang dapat merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama, dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen teknis yang terkait.

Peran kementrian luar negeri maupun Perwakilan Indonesia terkait dengan hal tersebut tidak dapat dipisahkan untuk menjalankan mekanisme konsultasi dan koordinasi dimana peranan kementrian Luar negri maupun Perwakilan Indonesia berperan sebagai:

1. *Coordinator*, memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan hubunga luar negeri.
2. *Informator*, menyediakan data yang diperlukan untuk menuju kerjasama luar negeri.
3. *Mediator*, mencari mitra kerja di luar negeri.
4. *Promotor*, mempromosikan potensi daerah di luar negeri.
5. *Fasilitator*, sebagai sarana untuk memfasilitasi penyelenggaran hubungan luar negeri.
6. *Protector, memberi* perlindungan terhadap pemerintah daerah yang menuju atau melakukan kerjasama luar negeri.

7. *Konsultan/supervisor*, Mengarahkan kerjasama agar lebih efektif (Nurbintoro, 2011:10).

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung berupaya dalam mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat, mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota berbasiskan potensi antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri, mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan sosial masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembangunan kota, hal ini selaras dengan kewenangan praktek hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dimana untuk mempromosikan hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi dan kebudayaan, serta fungsi dan tujuan utama hubungan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah untuk memfasilitasi terjadinya interaksi *non-state actor bussines.*

3.1.1.5 Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung

Sejak tanggal 1 Januari 2008, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, peristilahan untuk Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) telah dirubah menjadi Bagian Pemerintahan Umum, Pemerintahan Umum merupakan bagian yang membidangi Otonomi Daerah pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan, kerjasama Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri. Bagian Pemerintah umum mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan serta hubungan antar Lembaga yang mantap dan harmonis dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan menuju Bandung Kota Jasa yang *BERMARTABAT* Tahun 2008, dengan misi:

a) Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
b) Mewujudkan pengembangan Otonomi Daerah.
c) Mewujudkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang didukung sarana dan prasarana yang representatif.
d) Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
e) Mewujudkan kelancaran hubungan kerjasama di dalam dan luar negeri. (http://www.bandung.go.id/?fa=dilemtek.detail&id=40 diakses pada 25 februari 2013 pukul 13.30 WIB).

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung per 25 Februari 2013



(Sumber: http://www.bandung.go.id/images/dilemtek/sotk_bag_pemumum.jpg diunduh pada 25 februari 2013 pukul 13.30 WIB).

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dari segi administrasi dan keuangan dengan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan sumber daya manusia. Oleh karenanya, menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang meliputi lembaga pemerintah, lembaga swasta baik dalam maupun luar negeri.

Kerjasama merupakan keharusan, guna mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral atau multilateral. Tidak ada negara, organisasi maupun perusahaan yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan pihak lain. Interaksi tersebut terjadi karena percepatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Mengembangkan jaringan kerjasama antar daerah, baik di tingkat lokal maupun internasional dapat mendatangkan kontribusi positif bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang di daerah.Disamping dapat meningkatkan *mutual understanding* dan *City to city partnership*, dapat juga menjadi jembatan bagi pengembangan ekonomi lokal dan sebagai media transformasi bagi *capital* internasional, teknologi dan *skill* bagi negara-negara berkembang, kerjasama merupakan *the powerful engines* untuk menggerakan potensi domestik yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jalinan hubungan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Kota Bandung dengan kota-kota di dalam dan luar negeri tertuang dalam bentuk *Sister City* atau dapat juga disebut Mitra Kota/*Sister City* menjadi fenomena tersendiri yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kerjasama internasional.

Sister City adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan kota di suatu negara dengan kota di negara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan yang erat dan saling menguntungkan. Berdasarkan pendapat di atas *Sister City* dapat meningkatkan *volume* kerjasama dengan pengembangan di berbagai bidang kerjasama yang dianggap perlu bagi kesejahteraan masyarakat di suatu Kota.

Kota Bandung telah memiliki program *Sister City*, sebagai jembatan bagi potensi masyarakat Kota Bandung untuk berkembang dalam masyarakat dunia dan menjadikan payung bagi pengembangan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dunia. Kota Bandung mengadakan hubungan kerjasama *Sister City* sejak tahun 1960 dengan Kota Braunschweig-Jerman, sehingga menjadi kota pertama sekaligus terlama dalam penyelenggaraan Program *Sister City* di Indonesia, Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, Kota Bandung telah memperluas jalinan hubungan kerjasama dengan Kota-kota lain di luar negeri, seperti dengan Kota Fort Worth-Amerika Serikat; Kota Suwon-Republik Korea (Korea Selatan); dan Kota Yingkou serta Kota Liuzhou-Republik Rakyat China.

Jalinan hubungan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung dengan Kota-kota lainnya, baik di dalam maupun luar negeri berlandaskan pada peraturan dan hukum yang

berlaku, dalam konteks kerjasama sister city penyelenggaraan kerjasama tersebut tercantum dalam:

a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan-perubahannya.
b) Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
c) Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
d) Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
e) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
f) Undang-Undang No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
g) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Antar Daerah.
i) Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
j) Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2004 tentang Kerjasama.

k) Keputusan Walikota Bandung No. 330 tahun 2001 tentang Uraian Tugas Struktural pada Sekretariat Kota Bandung.

l) Keputusan Walikota Bandung No. 910/Kep.136/04-Keu Tahun 2005 tentang Pengesahan Dana Alokasi Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2005 (Pemerintah Kota Bandung, 2011: 8).

Sedangkan Bidang-bidang yang dikerjasamakan dalam bentuk kerjasama sister city merupakan bidang unggulan atau rencana unggulan masing-masing pihak dan bidang-bidang yang memiliki manfaat yang tinggi bagi pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan dan kemampuan teknis dalam bidang:

1. Ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan pariwisata;
2. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan administrasi;
3. Pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga;
4. Bidang-bidang lain yang kemudian akan disetujui oleh kedua belah pihak.

3.1.2 Kerjasama *Sister City* Pemerintah Kota Bandung

Sister City di Kota Bandung sendiri, diawali pada tanggal 2 Juni 1960 yang ditandai dengan ditandatanganinya piagam persahabatan Bandung-Braunschweig, oleh Walikota Bandung pada saat itu yakni R.Priatnakusumah serta Prof. Dr. George Eckert yakni utusan Kota Braunschweig di Bandung,

dengan adanya kerjasama antar kedua Kota tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan kerjasama dalam bidang budaya, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang pertukaran pemuda dan olahraga, program ekonomi perdagangan, serta penataan Kota, setelah kerjasama terjalin dengan Kota Braunschweig, Pemerintah Kota Bandung terus mengembangkan kerjasama dan hubungannya dengan Kota lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Fort Worth merupakan Kota di Amerika Serikat, letaknya berada di bagian selatan, tepatnya di negara bagian Texas, Kota ini merupakan Kota terbesar kelima di negara bagian Texas dan merupakan Kota terbesar ke 19 di Amerika Serikat, luas Kota Forth Worth mencapai 774,1 km^2 dengan penduduk 624.067 Jiwa, Kota ini di dirikan pada tahun 1849 yang pada awalnya merupakan sebuah pos tentara di kawasan Sungai Trinity, *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Forth Worth berawal dari saran B.J Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi yang juga sebagai Direktur Utama PT.IPTN, dengan harapan terciptanya kerjasama yang lebih mendalam antara IPTN yang berada di Kota Bandung dengan perusahan *Bell-Helicopter* yang berada di Kota Forth Worth.

Setelah melaui beberapa penjajakan, Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Forth Worth melakukan hubungan kemitraan dengan penandatanganan MoU *Sister City* antara kedua Kota tersebut di Kota Forth Worth pada tanggal 2 april 1990 oleh Walikota Bandung, Ateng Wahyudi dan Walikota Forth Worth, Bob Dalen. Kerjasama *Sister City* terus dikembangkan

oleh Pemerintah Kota Bandung setelah berhasil melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Forth Worth, Pemerintah Kota Bandung juga menjalin hubungan dengan Kota di Benua Asia, Inisiatif pertama berawal dari Pemerintah Kota Suwon yang berkeinginan mengadakan Mitra Kota dengan Kota Bandung yang disampaikan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Departemen Luar Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, kerjasama tersebut mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, investasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan, pemuda dan olah raga.

Pemerintah Kota Bandung dan KADIN mempelajari keinginan Kota Suwon dan mengadakan beberapa penjajagan dengan cara saling berkunjung antara pejabat Pemerintah kedua Kota, maka pada tanggal 5 Agustus 1996, kedua Kota menandatangani *Letter of Intend* (Naskah Pernyataan Keinginan Bermitra Kota), Selanjutnya setelah mempelajari prosedur kerjasama dilaksanakan penandatangan MoU oleh Walikota Bandung, Wahyu Hamijaya, dan Walikota Suwon, Sim Jae Douk, dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antar KADIN pada tanggal 25 Agustus 1997 di Kota Suwon, Korea Selatan. Di kawasan Asia Timur Lainnya tepatnya di Kota Yingkou yang dikenal sebagai Kota pelabuhan dengan nama Newchwang yang dibuka pada perjanjian Tainjin 1858, yang terletak pada Provinsi Liaoning, 400 mil timur laut dari Ibu kota China, Beijing. Merupakan salah satu Kota yang memiliki jalur Transportasi yang cukup berkembang

dibandingkan Kota lainnya di China, tidak hanya itu saja potensi perdagangan, industri, dan ekonomi juga sangat berkembang, menjadikan Kota ini sebagai *Sister City* Kota Bandung. Gagasan Mitra Kota (*Sister City*) Kota Bandung-Yingkou, Provinsi Liaoning-Republik Rakyat Cina bermula pada bulan Juni 2002 saat kunjungan para Pengusaha Yingkou kepada Bapak Aa Tarmana, Walikota Bandung, pada saat itu, kemudian kunjungan tersebut di tindak lanjuti dengan pengiriman delegasi Kota Yingkou yang dipimpin oleh Wakil Walikota, Mr. Hao Qinghui, pada tanggal 12 Desember 2003 yang menghasilkan surat pernyataan bersama keinginan membangun kerjasama persahabatan antara Kota Bandung dengan Kota Yingkou yang ditandatangani oleh Bapak Walikota Bandung, Dada Rosada, dan Wakil Walikota Yingkou, Mr. Hao Qinghui, kunjungan balasan delegasi Kota Bandung ke Kota Yingkou untuk menjajaki dan melihat potensi Kota Yingkou telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 10 Agustus 2005. Pembentukan Mitra Kota (*Sister City*) antara Kota Bandung dengan Kota Yingkou sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Departemen Luar Negeri. Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai dasar kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Yingkou direalisasikan pada peringatan hari jadi Kota Bandung ke-196 yaitu pada bulan september 2006 (Pemerintah Kota Bandung: 2011. 39). Setelah Kota Yingkou, pada tanggal 5 Maret 2004 Pemerintah Kota Bandung telah

menerima surat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou tertanggal 01 Maret 2004, No. BB-062/KJR-GUANGZHOU/III/04 perihal rencana kunjungan Wakil Walikota Liuzhou, Provinsi Guangxi, Republik Rakyat China ke Kota Bandung, dalam rangka penjajakan kerjasama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Liuzhou dan pada tanggal 31 Maret 1 April 2004, delegasi Kota Liuzhou dipimpin oleh Wakil Walikota, Ms. Li Xuxiang, di dampingi oleh Mr. Bai Weixing, Mr. Gao Pu dan Ms. Zhang Xiaozhong mengunjungi Kota Bandung. Pada Pertemuan di Balai Kota Bandung tanggal 31 Maret 2004 Wakil Walikota Liuzhou menyampaikan keinginan yang kuat kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung yang mewakili Bapak Walikota Bandung, untuk menjadi Mitra Kota dengan Kota Bandung dan pada saat yang bersamaan menyampaikan undangan resmi dari Walikota Liuzhou kepada Walikota Bandung untuk berkunjung ke Kota Liuzhou, kunjungan balasan Delegasi Kota Bandung ke Kota Liuzhou untuk menjajaki Mitra Kota dan melihat potensi kota Liuzhou dilaksanakan pada bulan Agustus 2005. Akhirnya setelah melewati proses penjajakan dan terjalinnya kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama luar negeri yang berbentuk *Sister City* pada bulan September 2006 disepakati Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Liuzhou yang lebih memfokuskan pada sektor pengembangan ekonomi dan sektor industri guna mensejahterakan masyarakat kedua Kota.

Tabel 3.1

Kerjasama *Sister City* Kota Bandung Sampai Bulan Desember tahun 2012

no	Mitra kerjasama di luar negeri	Bidang yang dikerjasamakan	Produk hukum	Hasil kerjasama
1	*Sister City* Bandung-Braunschweig, Jerman	1. Kebudayaan; 2. Pendidikan dan Pelatihan; 3. Program Peningkatan Sektor Pariwisata; 4. Program Olah Raga; 5. Program Pertukaran Pemuda; 6. Program Kunjungan; dan 7. Program Ekonomi dan Perdagangan.	*Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani tanggal 2 Juni 1960 yang diperbaharui 19 Juni 2000.	1. Pembangunan Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM); 2. Batuan alat pemotong hewan; 3. Bantuan mobil Vw Combi; 4. Bantuan mesin tik dan slide projector; 5. Penataan kota; 6. Bantuan alat kesehatan; 7. Bantuan bagi Perguruan Tinggi; 8. Bantuan survey penataan Kali Cikapundung; 9. Pelatihan Peningkatan SDM Pemerintah Kota Bandung; 10. Bantuan bencana alam tsunami; 11. Pertukaran pemuda/ siswa; 12. Magang pejabat Pemerintah Kota Bandung; 13. Penampilan tari kesenian; 14. Pameran Dagang / Expo Hannover 2000; 15. Rencana pembaharuan MoU dan mengaktifkan kembali kerjasama terutama di bidang ekonomi dan pariwisata; 16. Rencana pertukaran pelajar tahun 2013.
2	*Sister City* Bandung - Fort Worth, Texas, Amerika Serikat	1. Ekonomi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata; 2. Ilmu Pengetahuan , Teknologi, dan Administrasi; 3. Pemuda dan Olah Raga; dan 4. Sosial dan Kemasyarakatan .	*Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani tanggal 2 April 1990	1. Bantuan alat kesehatan; 2. Bantuan bagi Perguruan Tinggi; 3. Bantuan peralatan Base Ball dan pelatihannya; 4. Bantuan kepada Panti Asuhan; 5. Bantuan Program Gawat Darurat; 6. Bantuan bencana alam tsunami; 7. Pertukaran pemuda/ siswa; 8. Penampilan tari kesenian; 9. Bantuan buku – buku; 10. Ikut serta dalam program International Leadership Academy (ILA) sejak tahun 2010; 11. Kerjasama Sister School antara SMA 5 Bandung dengan Arlington High School Fort Worth; 12. Pelatihan pemadam kebakaran di Fort Worth tahun 2011; 13. Rencana pertukaran pelajar dari Kota Fort Worth ke SMA Negeri 5 Bandung tahun 2013
3	*Sister City* Bandung - Suwon, Rep.Korea	1. Bidang Perdagangan; 2. Bidang Pemuda dan Olah Raga;	*Memorandum of Understanding*	1. Delegasi bisnis Kota Suwon telah mengadakan pembicaraan dengan KADIN Kota Bandung pada Bulan Juni 2000, dimana pada saat itu Pengusaha Kota Bandung telah memberikan

	Selatan	dan 3. Bidang Investasi.	(MoU) ditandatangani tanggal 25 Agustus 1997	informasi tentang kegiatan bisnis dan ekonomi di Kota Bandung; 2. Kompetisi Persahabatan Sepak Bola Junior antara kedua kota; 3. Pada tahun 2004 Kota Suwon telah mengirimkan delegasinya ke Kota Bandung sebanyak 2 kali, dimana dalam kunjungan tersebut telah dibicarakan beberapa rencana dan langkah kedepan untuk merealisasikan berbagai program yang telah lama direncanakan oleh pihak Kota Bandung dan Kota Suwon; 4. KADIN Kota Bandung bekerjasama dengan Pemerintah Kota Suwon untuk membuka pusat informasi perdagangan, ekonomi dan industri di Kota Suwon; 5. Pemerintah Kota Bandung dan Kota Suwon melaksanakan studi banding antar Pegawai Pemerintahan untuk mempelajari manajemen pemerintahan; 6. Bussiness Matching antara pengusaha Kota Bandung dengan pengusaha Kota Suwon; 7. Transaksi dagang antara pengusaha Kota Bandung dengan pengusaha Kota Suwon serta promosi produk-produk Kota Bandung; 8. Pembangunan Monumen Sister City Bandung-Suwon di Suwon; 9. Mengirimkan koki Kota Bandung untuk mengikuti 'Food Festival' pada Festival Hwaseong di Suwon; 10. Kerjasama antara Universitas Maranatha Bandung dengan Hanshin Universty Suwon; 11. Pertukaran pemuda Suwon Youth Foundation tahun 2011 dan 2012; 12. Bantuan pembangunan MCK di Desa Sukamulya, Kecamatan Cinambo dari Kyonggi University dan bantuan alat-alat tulis tahun 2012; 13. Program Kelas Bahasa Korea di Universitas Maranatha sejak tahun 2011; 14. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan di Desa Sukamulya; 15. Rencana pertukaran pelajar Kota Bandung ke Kota Suwon tahun 2013.
4	*Sister City* Bandung - Yingkou, RRC	1. Bidang Perdagangan dan Industri; 2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 3. Pariwisata dan Lingkungan Hidup 4. Bidang Pemuda dan Olah Raga 5. Ilmu Pengetahuan	*Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani tanggal 21 September 2006	1. Penandatanganan MoU antar pengusaha kedua kota

5	*Sister City* Bandung - Liuzhou, RRC	1. Bidang Ekonomi , Perdagangan dan Industri; 2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Pariwisata dan Lingkungan Hidup; 4. Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kesehatan; dan 5. Ilmu Pengetahuan dan bidang lain yang dimungkinkan.	*Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani tanggal 21 September 2006	1. Kunjungan timbal balik pejabat kedua Pemerintah Kota; 2. Penjajakan kerjasama antara DPRD Kota Bandung dengan Dewan Kota Liuzhou; 3. Program pertukaran pelajar yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2011; 4. Mengaktifkan kembali program pertukaran guru; 5. Pembangunan Monumen Sister CityBandung-Liuzhou di Kota Bandung; 6. Pengiriman Staff Dinas Pertamanan dan PemakamanKota Bandung untuk mempelajari pengembangan pertamanan.

(Sumber Data kerjasama *Sister City*, 2012:1)

Interaksi dalam bentuk kerjasama ini dalam pengembangan terhadap kota tersebut pada bidang ekonomi, perdagangan, industri dan pariwisata, bidang Ilmu pengetahuan, teknologi dan Administrasi, bidang pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, bidang lingkungan hidup, kependudukan dan pembangunan perkotaan serta bidang-bidang lainnya diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua kota dan hubungan antara Indonesia dengan Negara-negara lainnya dalam dunia internasional, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2.1 *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Braunschweig, Jerman

Braunschweig terletak antara Hanover dan Berlin yang berada pada negara bagian Lower Saxony, Jerman, berpenduduk sekitar 250 ribu jiwa dengan luas wilayah 192,09 km², sebagai sebuah kota besar

modern dengan sejarah panjang tradisi Kota ini dijuluki Kota Singa yang memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan seperti wisata sejarah yang otentik, aristektur *post-modern*, penelitian kelas atas dan perusahaan yang inovatif, budaya hidup, bidang olahraga dan kegiatan rekreasi serta taman mewah dan daerah alam untuk tujuan rekreasi.

Sejarah Braunschweig terkait erat dengan, *Henry the Lion* salah satu kaisar bangsa Prusia, yang menyatakan Braunschweig merupakan kediamannya diabad ke-12, dan berkembang menjadi salah satu pusat paling penting bagi perdagangan di Jerman. pada tahun 1.209 Braunschweig menjadi salah satu kota penting di Eropa yang ketika itu bernama Kota Kaisar *Urbs Regia* di bawah Kaisar Jerman-Romawi Guelph Otto IV, putra *Henry the Lion.* selain itu Kota Braunschweig memiliki banyak Lembaga-lembaga penelitian nasional, salah satunya Universitas teknik tertua di Jerman juga terletak di kota ini.

Selain itu terdapat industri otomotif dan penunjangnya, bidang kebudayaan, kesenian dan pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan di Braunschweig. The Hochschule für Bilden de Kunste, merupakan satu-satunya Universitas Seni di Lower Saxony dan yang terbesar kedua di Jerman yang selalu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan inovasi, tidak hanya itu saja di kota ini terdapat Teater dan berbagai wadah seniman ditambah dengan

gaya arsitektur klasik dan *avant-garde* yang tercermin pada arsitektur di kota ini, festival kesenian di kota ini sering digelar seperti *Burg platz Open Air*, *Soli deo Gloria*, *City Jazz Night* dan *Internasional Film Fest Braunschweig* yang telah menginspirasi pecinta bidang kesenian dunia internasional, dalam olah raga kota ini telah melahirkan Prof.Konrad Koch ia adalah seorang guru di Braunschweig dan merupakan pelopor untuk sepakbola di Jerman, ia telah berjasa dalam mengembangkan aturan sepakbola dimana aturan saat sepak bola jerman dibawah *Deutsche Fussball-Bund* (Perserikatan SepakBola Jerman) masih didasarkan atas karyanya, ia juga merupakan pendiri klub pertama sepakbola di jerman yakni *BFC Germania* tahun 1888 di Kota Berlin-Tempelho(http://www.braunschweig.de/english/city/about_braunschweig.html diakses pada 6 maret 2013 pukul 18.20 WIB).

Hubungan kemitraan *Twinning City* menjadi salah satu tradisi di Kota Braunschweig, dengan tujuan penguatan kerjasama internasional untuk mempromosikan Budaya dan mendalami hal-hal yang penting dalam pemahaman internasional guna untuk memberikan kontribusi bagi penjagaan perdamaian di dunia, beberapa catatan mengenai Kota Braunschweig:

1. Kota Braunschweig merupakan rumah bagi perusahaan piano dengan kualitas dan standar internasional yakni *Schimmel* dan *Grotian Steinweg*.
2. Kota Braunschweig adalah tempat pengembangan dan riset dari perekonomian di Eropa dalam pengembangan ekonomi yang cukup pesat
3. Kota ini juga merupakan barometer bagi pengembangan keilmuan dan penelitian ilmiah, hal ini merujuk pada ditunjuknya Kota ini sebagai Kota Ilmiah Jerman pada tahun 2007

Latar belakang kota Braunschweig yang memiliki banyak kesamaan dengan Kota Bandung, menjadi salah satu faktor terjalinnya kerjasama, dan landasan atau dasar dari keinginan Kota Braunschweig dan Bandung mengadakan *Partnership* bermula dari saran Prof.DR. George Eckert, salah satu staf *UNESCO*, berpijak dari kenyataan bahwa kedua kota ini terdapat dua perguruan tinggi keguruan yakni *Padagogische Hochschule* yang berada di Braunschweig dan di Bandung terdapat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang pada saat itu bernama *PTPG*, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang kita kenal sekarang bernama Universitas Pendidikan Indonesia.

Pada tanggal 24 juli 1959, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh *atase* kebudayaan Republik Indonesia di Bonn, Jerman yakni

Bapak Marjoenani, Mengemukakan hasrat untuk mengadakan hubungan persahabatan kedua kota yakni Bandung dan Braunschweig, guna merealisasikan hubungan persahabatan ini maka pada bulan September 1959 dilakukan pertemuan khusus antara Duta Besar Republik Indonesia yakni Dr. Zairin Zain dengan Prof. DR. George Eckert.

Pada suatu seminar tanggal 10 mei 1960 secara resmi hal tersebut disampaikan oleh *atase* kebudayaan Republik Indonesia, yang pada saat itu dijabat oleh Rochmat Hardjono kepada Direktur Kota Braunschweig, Hans Gunther Weber di Balai kota Braunschweig.

Tanggal 18 mei 1960 Pemerintah Kota Braunschweig menyetujui usulan tersebut, pada tanggal 24 mei 1960 di museum Kota Braunschweig dilaksanakan upacara khusus yang meresmikan persahabatan kedua kota tersebut dengan ditandai penandatanganan piagam ikatan persahabatan Bandung-Braunschweig oleh Duta Besar Republik Indonesia pada saat itu yakni Dr.Zairin Zain dan Hans Gunther Weber selaku direktur Kota Braunschweig dan Mrs. Martha Fuchs selaku *Oberburgermeister* yang berarti Walikota Braunschweig.

Piagam persahabatan itu baru disempurnakan setelah ditandatangani oleh Walikota Bandung, R. Priatnakusumah yang disaksikan oleh 300 orang tokoh Kota Bandung serta utusan Kota

Braunschweig yaitu Prof. Dr. George Eckert pada tanggal 2 juni 1960 di Bandung.

Dengan pertimbangan bahwa kerjasama ini harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga diakui oleh dunia internasional, maka hubungan kerjasama yang telah berjalan lebih dari 40 tahun kemudian diperbaharui dengan ditandatanganinya *MoU*(*Memorandum Of Understanding*) oleh WaliKota Bandung, Aa Tarmana dan Walikota Braunschweig pada saat itu yakni Werner Steffens Pada tanggal 19 juni 2000 di Kota Braunschweig, Jerman. (Pemerintah Kota Bandung, 2011:14).

Kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig yang telah berlangsung hingga saat ini yang berlandaskan *Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani tanggal 2 Juni 1960 merupakan sebuah momentum yang menjadi awal bagi perkembagan *Sister City* di Indonesia, telah menghasilkan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan antara kedua Kota, yaitu dalam bidang:

1. Kebudayaan:
    a) Penampilan tim kesenian Kota Bandung pada pameran Harz Und Heide dari tahun 1974-1997

b) Penampilan tim kesenian Kota Bandung pada *Event Expo* di Hannover dan Braunschweig pada tahun 2000

2. Pendidikan dan pelatihan:
    a) Program redaktur radio lehrgang 1972.
    b) Program pelatihan hotel dan gastronomi (restoran) 1972.
    c) Program Studi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Seni Rupa ITB dengan HBK 1975-2000.
    d) Program pelatihan perawat 1973-1974.
    e) Program pelatihan percetakan/Grafika 1975.
3. Program olahraga:
    a) Pelatihan dan eksebisi olahraga senam Kota Bandung 1974
4. Program pertukaran pemuda:
    a) Pengiriman pemuda Kota Bandung ke Kota Braunschweig dan penerimaan pemuda Kota Braunschweig ke Kota Bandung 1985-2001
5. Program ekonomi dan perdagangan:
    a) Pengiriman misi dagang oleh Kadin kedua Kota bersamaan dengan pameran Harz Und

Heide 1974-1997(Pemerintah Kota Bandung, 2011:22).

Salah satu solusi meningkatkan potensi yang dimiliki Kota Bandung dalam kerangka mengembangkan ekonomi nasional adalah dengan mengembangkan *Network* (jaringan kerjasama) Pemerintahan. salah satu bentuk jaringan kerjasama adalah dengan mengembangkan model *Sister City* yang lebih mendalam dengan kota yang telah menjadi mitra serta mengembangkannya, hal ini ditunjukan untuk mengoptimalisasikan integeritas yang sudah terjalin serta meningkatkannya lagi. oleh karena itu setelah *Memorandum of Understanding* diperbaharui pada 19 Juni 2000.

Komitmen Walikota Braunschweig untuk membantu program-program yang telah disepakati antara kedua Kota menghasilkan program-program yang diupayakan direalisasikan secara berkelanjutan demi tercapainya pembangunan di Kota Bandung dalam Bidang budaya, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang pertukaran pemuda dan olahraga, program ekonomi perdagangan, serta penataan Kota, dalam mengaplikasikan kewenangan menuju kerjasama yang dapat dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi perlunya dukungan dari berbagai komponen untuk mencapai tujuan kerjasama *Sister City* ini perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Bandung, sebagai *coordinator* dalam menyelaraskan *non-state actor* dalam bidang ekonomi, sosial ,

dan budaya dalam menterjemahkan potensinya terhadap dunia internasional, telah menghasilkan:

Tabel 3.1

Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Braunshweig Sampai Bulan Desember tahun 2012

NO.	KEGIATAN / PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN		KETERANGAN
		BRAUNSCHWEIG	BANDUNG	
1	Peningkatan mutu siaran radio dan TV	- Deutsche Welle (DW) - Deutsche TV (DTV) - Koran Braunschweiger Zeitung	1. TVRI Jawa Barat 2. MQTV 3. Space Toon TV 4. TV Bandung 5. STV 6. PJTV 7. IMTV 8. Multi Visual Jabar Televisi 9. Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) 10. Surat Kabar Daerah	- Pemerintah Kota Braunschweig memfasilitasi kerjasama antara DW dan DTV dengan TV dan Radio beserta Surat Kabar yang ada di Bandung - Braunschweig.
2.	Pengembangan SDM	- Pemerintah Kota Braunschweig, Negara bagan Niedersacschen dan Republilk Federal Jerman - Tehnische University of Braunschweig	- Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Republik Indonesia - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Bandung)	- Memfasilitasi peningkatan kualitas SDM untuk memenuhi standar regional maupun global (pasar bebas). - Memfasilitasi Pelatihan pendidikan.
3.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kota Braunschweig (Gesundheit Ant Der Stand Braunschweig)	- Dinas Kesehatan Kota Bandung - PMI Kota Bandung - Yayasan Kanker Kota Bandung	- Peningkatan pengetahuan dokter & perawat baik peralatan medis maupun obat-obatan - Penanganan HIV/Aids - Penanganan Penyakit Kanker - Penanganan transfusi darah
4.	Pembinaan Generasi Muda	- Dinas Pemuda (Yugend Amt) - Yugen Herberge	- Dinas Pendidikan - BP GGM Kota Bandung	- Penanganan Pendidikan luar sekolah - Penanganan narkoba - Penanganan kenakalan remaja dll
5.	Pelatihan pegawai Pemerintah Kota Bandung bidang informatika	Stadt Braunschweig EDV (Electronische Daten Verarbeitung)	- Dinas Informatika dan Komunikasi	- Peningkatan pengetahuan cyber dity

6.	Peningkatan kualitas Taman Kota	Dinas Pertamanan Kota Braunschweig	Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung	- Pembangunan / Renovasi Taman Kota Unggulan - Pemeliharaan Taman Kota Unggulan - Pelatihan / Job training mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Braunschweig sebagai 'branch marking' pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung - Seminar/lokakarya mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) kaitannya dengan issu "Global Warming"
7.	Pasar Usaha Kecil	Dinas Koperasi Kota Braunschweig	Dinas Koperasi Kota Bandung	- Pameran / promosi - Design Produk - Pelatihan Pengusaha dan Pejabat Kota Bandung - Simpan Pinjam Keuangan - Lembaga Bantuan Keuangan
8.	Peningkatan kualitas Aparat Kepolisian, Tentara, Aparat Pengadilan dan Kejaksaan	Amstgerich, landgerich, kommandeur, Polizei Braunschweig	Kepolisian, Tentara, Aparat Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung	- Pelatihan, Workshop, Seminar dan *bench marking* serta *best practices* kedua kota

(Sumber Data kerjasama *Sister City*, 2012:3)

Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri, realitas yang ada menunjukkan program pengembangan *Sister City* Kota Bandung dirasakan belum optimal. Permasalahan seperti belum adanya komunikasi yang belum tersampaikan seperti belum tersosialisasikannya program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, permasalahan klasik yang selalu dihadapi oleh Kota Bandung, di antaranya tingginya biaya yang terjadi sebagai konsekuensi dari dilaksanakan semua program dan kegiatan, karena semua mengacu kepada standar dan protokol internasional.

Keberhasilan program kerjasama *Sister City* hanya akan terwujud jika didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, sumber dana yang memadai agar program-program yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memenuhi harapan semua pihak, dan dukungan yang nyata dari semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada program ini.

Adanya inkonsistensi dari kebijakan Pemerintah Kota atau instansi yang terkait, sehingga program yang telah disepakati tertunda atau dibatalkan. Biasanya ini tejadi karena pergantian pejabat pemerintah kota atau birokrasi yang panjang dan tidak praktis.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan suatu rancangan dan kerangka metode penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif analasis*, penelitian tersebut adalah penelitian yang secara menyeluruh, dimaksudkan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai fenomena/kejadian tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus deskriptif, merujuk pada permasalan dan *variabel* tersedia peneliti hanya melakukan analisa data

berdasarkan data dan informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan sumber-sumber lainnya dalam membahas permaslahan yang diteliti peneliti, sehingga validtias data yang nantinya akan diolah dapat teruji dan dipertanggung jawabkan secara akademis.

3.2.1.1 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang peneliti jadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

1) Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung. hal ini terkait dengan permasalahan yang diteliti dimana adanya peranan Daerah dalam memberikan kontribusi untuk menjalin hubungan luar negeri dan kewenangannya dalam menjalankan kerjasama *Sister City.*
2) Diar Nurbintoro. peneliti berniat untuk melaukan wawancara mengenai sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam kewenangannya untuk menjalankan hubungan luar negeri khususnya Kerjasama *Sister City* yang dilakukan Pemerintah Kota/Daerah.
3) Kementrian Luar Negeri, Direktur Hukum, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia sehingga peneliti dapat memperoleh data yang valid untuk mendukung penelitian ini.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Studi **Kepustakaan,** dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya.

Penelusuran **Data melalui *Internet* dan Media *Online,*** peneliti dapat menggunakan Media Internet untuk mengumpulkan berbagai informasi, data, dan referensi yang terkait dengan permaslahan yang diteliti yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya.

Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak dari Pemerintah Kota Bandung dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementriaan Luar Negeri Republik Indonesia.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan teknik *Purposive*, yakni penentuan pada pihak-pihak informan bedasarkan tujuan, masalah, dan variabel penelitian, Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. peneliti

bertemu dengan narasumber yang menjadi salah satu pegawai, staff, maupun anggota tim dalam bidang dokumentasi yang secara komprehensif mendeskripsikan seputar program-program yang dijalankan pada kerjasama Sister City di Kota Bandung.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data, artinya data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran *online* dan wawancara, yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitan yang mengacu pada tujuan penelitian, karena dengan hal tersebut dapat ditelaah terhadap data-data yang menjadi dasar untuk membangun penelitian ini, dimana konteks hubungan luar negeri dan kerjasama *Sister City* memerlukan berbagai macam sumber.

Hal ini dimaksudkan agar data yang digunakan dapat berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat, penyajian data peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan, penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari informan yakni Pemerintah Kota Bandung dalam kewenangan, Pemerintahan Daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri pada kerjasama *Sister City* di Kota Bandung, dan diharapkan dengan penggunaan teknik ini didapatkan data yang relevan yang dapat digunakan bagi tujuan akademis.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat yang dapat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, diantaranya:

1.Pemerintah Kota Bandung

Jl. Wastukancana No. 2, Bandung

Telp.62-22-4224754

Fax.62-22-4236150

2.Kedutaan Besar Jerman

Jl. MH Thamrin No. 1, Jakarta

Telepon : 021 3985 5000

Fax : 021.3901757

3. Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan

Jl.Ciumbuleuit 94, Bandung

Telp.62-22-2032655

4.Perpustakaan Universitas Padjajaran

Jl.Raya Bandung Sumedang Km. 21 Sumedang

Telp.62-22-84288888

Fax.62-22-84288899

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu sembilan bulan terhitung dari bulan November 2012 sampai dengan bulan Juli 2013.

NO	Kegiatan	Waktu Penelitian									
		2012		2013							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Pengajuan judul										
2.	Pembuatan usulan Penelitian										
3.	Seminar usulan penelitian										
4.	Bimbingan skripsi										
5.	Pengumpulan data										
6.	Sidang										